

Volume 16, No. 20, Juni 2015

ISSN 1412-1689

# Suluah

Media Komunikasi Kesejarahan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan  
Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang

## MENAPAKTILASI PERADABAN

DAN KEBUDAYAAN  
B PADANG

DLOGI SOSIAL JUGUN IANFU  
RBNAN KEKERASAN SEKSUAL  
AN JEPANG DI INDONESIA

LEMBAGA ADAT "RAJO PENGHULU"  
ARAKAT BENGKULU

DJAMALOEDDIN ALIAS WAK KETOK  
DAN TRANSMIGRASI JAWA DI PASAMAN

## DAFTAR ISI

Sejarah Perkebunan dan Dampaknya Bagi Perkembangan Masyarakat di *Onderafdeeling Banjoeasin En Koeboestrekken*, Keresidenan Palembang, 1900-1942  
**Zusneli Zubir (1)**

Pemikiran Tashawuf Abdurrauf Singkel dalam Kitab *Daqa'iq Al-huruf*: Studi Budaya Naskah Nusantara  
**Ahmad Rivauzi (18)**

Agresi Penduduk Asli terhadap Transmigran di Desa Tongar Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 1954  
**Witrianto (36)**

Aspek Psikologi Sosial *Jugun Ianfu* sebagai Korban Kekerasan Seksual Pendudukan Jepang di Indonesia  
**Oslan Amril dan Irma (46)**

Memahami Nilai-nilai Peninggalan Masa Lalu di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Media Informasi dan Pembelajaran  
**Efrianto A. (58)**

Muhammadiyah dalam Perjuangan Kemerdekaan di Kampar  
**Ahmal (67)**

Minangkabau dalam Novel *Mengurai Rindu* Karya Nang Syamsuddin  
**Aimifrina (82)**

Perang Rakyat Semesta : Perjuangan Mempertahankan Kedaulatan NKRI di Bengkulu (1945 - 1949)  
**Seno (95)**

*Katuba* Salawat Dulang Ababil : Studi Awal terhadap Sastra Lisan Minangkabau Bertema Islam  
**Hasanadi (107)**

Eksistensi Lembaga Adat "Rajo Penghulu" pada Masyarakat Bengkulu  
**Refisrul (120)**

"ANNAKUMARI" Tokoh Maestro Seni Tari dan Songket Palembang  
**Ajisman (134)**

Tradisi *Jalang Manjalang* pada Masyarakat Minangkabau di Nagari Sialang  
**Ernatip (153)**

Ketahanan Keluarga dalam Rumah Gadang Masyarakat Minangkabau  
**Silvia Devi (183)**

Djamaloeddin Alias Wak Ketok dan Transmigrasi Jawa di Pasaman  
**Undri (194)**

Resensi Buku  
**Mutiara Alhusna (209)**

PERPUSTAKAAN BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PADANG
No Klas : 060
N I : 6521 / BPN B - 16
Tgl Terima 10/10-16

## **AGRESI PENDUDUK ASLI TERHADAP TRANSMIGRAN DI DESA TONGAR KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 1954**

Oleh  
Witrianto

### **ABSTRACT**

Tongar the Transmigration Settlement Unit located in Nagari Water Tower, District Pasaman, Pasaman, West Sumatra. Homesteader origin and motives of migration has important differences with the origin and motives of migrants of Indonesia. Homesteader who is a citizen of the repatriation of Suriname had the habit of doing a dance or modern dances from Latin America such as Rumba and Tango. For the Minangkabau dance it would be cursed so on numerous occasions has resulted in the incident because the youths who fanatically disrupt dances, even in the homes of private residence though. Cultural differences lead to conflict between the two groups. The natives were not able to accept these differences and supported by fears of the negative influence of the culture brought by migrants to encourage them to carry out aggression and attempt to reclaim their ancestral territories that have been submitted to the government for transmigration settlements

Keywords: Transmigration, Aggression, Repatriation

### **1. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dan membentang sepanjang lebih dari 5.000 km. Dari segi etnis, bangsa Indonesia merupakan kumpulan lebih dari 900 kelompok etnis dengan berbagai identitas kulturalnya masing-masing, dengan lebih dari 300 kelompok bahasa daerah yang juga memiliki adat-istiadat yang berbeda-beda (Yudohusodo, 1998: 26).

Persoalan kependudukan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, persebaran penduduk di Indonesia sangat timpang. Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,7 persen dari luas seluruh daratan Indonesia, dihuni oleh sekitar 59,9 persen dari jumlah

seluruh penduduk Indonesia. Sementara Kalimantan, pulau terluas di Indonesia (28,1 persen dari seluruh daratan Indonesia), hanya dihuni oleh sekitar 5,1 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Irian Jaya, provinsi terluas di Indonesia, dihuni oleh kurang dari satu persen penduduk Indonesia (Sensus Penduduk 1990).

Tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi tersebut tentu ikut mendorong proses pemiskinan di kalangan para “petani gurem” atau buruh tani di Pulau Jawa. Di luar Jawa, proses pemiskinan sebaliknya terjadi karena kekurangan penduduk. Desa-desa di luar Jawa banyak yang berpenduduk sangat sedikit dan lokasinya terpencil sehingga jika dibangun sekolah akan kekurangan murid, jika dibangun jalan atau dipasang jaringan listrik, biayanya sangat mahal dan tidak efisien, jika dibangun pasar,

pembeli dan barang yang diperjualbelikan sedikit. Akibatnya desa-desa itu tetap tertinggal.

Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan pemindahan penduduk dari Pulau Jawa yang sudah terlalu padat ke pulau-pulau lainnya di Indonesia yang kepadatan penduduknya relatif masih jarang. Di Indonesia proses pemindahan penduduk ini, meskipun kurang tepat, dikenal dengan istilah "transmigrasi". Mungkin yang lebih tepat adalah migrasi dalam negeri atau antardaerah, namun meskipun demikian, tulisan ini tetap menggunakan istilah transmigrasi karena sudah sangat umum dipakai dan juga digunakan oleh instansi resmi di Indonesia

Salah satu lokasi transmigrasi yang ditetapkan pemerintah adalah Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tongar yang terletak di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. Meskipun secara kuantitatif, jumlah transmigran yang menempati UPT Tongar tidak besar, namun karena berbagai alasan, pemukiman transmigran ini perlu mendapat perhatian. Pertama, asal kelompok ini dan motif-motif migrasinya mempunyai perbedaan penting dengan asal dan motif-motif migran-migran Indonesia yang lain. Selanjutnya di sini dipraktikkan sistem berkolonisasi yang istimewa yang tegas-tegas menekankan penggarapan tanah secara kolektif. Akhirnya asimilasi daerah pemukiman di satu lingkungan yang kebudayaannya sangat berbeda ini menimbulkan masalah-masalah khusus.

### 1.2. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dan membantu jalannya pengumpulan data dalam penelitian, maka tulisan ini berangkat dari beberapa pertanyaan:

1. Sejauhmanakah proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh transmigran terhadap penduduk asli?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi para transmigran di lokasi transmigrasi?

3. Bagaimanakah reaksi penduduk asli menghadapi penduduk pendatang yang memiliki banyak perbedaan kultural dengan mereka?

4. Konflik apa saja yang muncul dan bagaimana pemecahannya?

### 1.3. Tinjauan Pustaka

Untuk memudahkan penelitian ini, digunakan pendekatan psikologi sosial. Tidak semua teori digunakan sebagai alat analisis, hanya teori mengenai agresi dan konflik yang digunakan dalam tulisan ini, dengan harapan supaya dapat diperoleh gambaran yang lebih mendetail tentang permasalahan yang dihadapi..

Pengertian agresi menurut psikolog sosial merujuk pada kejahatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik psikolog sosial maupun masyarakat, secara umum membedakan antara bentuk perilaku yang membahayakan berdasarkan motif, legitimasi, dan kadarnya. Kita membedakan perilaku yang membahayakan berdasarkan motif atau maksud dari perilaku.

Beberapa teori mengenai sebab-sebab terjadinya agresi di antaranya ialah; (i) teori naluri dari Sigmund Freud, menyatakan bahwa pada dasarnya manusia punya dua naluri, yaitu naluri seksual dan naluri agresi. Naluri seksual bertujuan untuk melanjutkan keturunan, sedangkan naluri agresi bertujuan untuk mempertahankan diri atau kelompoknya, (ii) teori frustrasi-agresi, menyatakan bahwa agresi dipicu oleh hambatan terhadap pencapaian suatu tujuan, (iii) teori biologis, menyatakan bahwa agresi yang ada pada diri seseorang disebabkan oleh faktor keturunan, (iv) teori belajar sosial (social learning), menyatakan bahwa seseorang menjadi agresi karena sering melihat hal tersebut, dan (v) teori kognitif, menyatakan bahwa sifat agresi terjadi karena adanya variabel-variabel lain disamping variabel belajar sosial.

Situasi yang dapat menyebabkan terjadinya agresi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain di antaranya

ialah, adanya gangguan, serangan, atribusi di sekitar orang lain, isyarat agresi, status sosial yang bersifat relatif, adanya deindividuasi dan norma-norma institusi, dan norma-norma budaya.

Penimbulkan emosi terjadi oleh penolakan kondisi yang diartikan sebagai beberapa bentuk emosi lain, ketakutan, ketertarikan, depresi, dan sebagainya. Penyebab lainnya adalah pengarahannya agresi kita terhadap orang lain tanpa menunjukkan kemarahan atau beberapa emosi yang lain. Psikolog sosial kadang-kadang membedakan antara agresi marah bersebab dan marah bebas dengan menggunakan agresi permusuhan dan agresi pertolongan.

Konsep lain yang merupakan kata kunci dalam tulisan ini adalah konsep konflik. Konflik atau agresi timbal balik merupakan agresi yang dibalas dengan agresi lain. Menurut Wiggins (1994), konflik terjadi karena adanya kompetisi dan frustrasi. Sebuah agresi kelompok tidak dipengaruhi oleh faktor tunggal, banyak sekali variabel-variabel yang menyebabkannya. Menurut Wiggins (1994), keberhasilan bisa dianggap kegagalan bagi orang lain. Konflik tidak akan terjadi jika kita tidak menganggap bahwa keberhasilan orang lain adalah kegagalan atau kekalahan bagi kita.

Faktor-faktor pengurangan kemungkinan konflik meningkat mencakup, *pertama*, pertukaran status yang sama, *kedua*, kerjasama, terutama jika kerjasama tersebut berhasil dalam mencapai tujuan bersama, dan *ketiga*, perbedaan anggota-anggota kategori sosial negatif.

Kompetisi adalah satu situasi ketika manusia merasa dirinya memiliki pertentangan obyektif atau tujuan, sehingga keberhasilan dari suatu kelompok diartikan sebagai kegagalan dari kelompok lain. Masing-masing kelompok, oleh karena itu, merasa bahwa yang lain dapat mengganggu pencapaian tujuannya. Beberapa bentuk kompetisi yang ada di antaranya adalah dalam masalah perkawinan, industri, penjualan dan pelayanan, dan olahraga.

Konflik tidak selalu terbatas untuk dua kelompok. Tambahan kelompok dimungkinkan oleh partisipasi dalam formasi pada koalisi untuk peningkatan konflik, atau oleh partisipasi sebagai penengah dalam usaha untuk mengurangi konflik.

## **2. PROSES KEDATANGAN TRANSMIGRAN**

### **2.1. Pembukaan Lokasi Pemukiman**

Tongar merupakan nama suatu kampung kecil yang terletak di Nagari Airgadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Kampung ini terletak di tepi jalan antara Talu dan Airbangis, 170 km di sebelah utara Kota Bukittinggi yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Tengah sewaktu lokasi transmigrasi ini dibuka pada tahun 1954.

Warga yang menempati UPT Tongar merupakan repatrian Suriname yang kembali ke Indonesia. Latar belakang kelompok ini, termasuk sejarah migrasi ke Suriname dan motif-motif mereka untuk kembali dapat memberikan gambaran tentang keberadaan mereka. Situasi kehidupan di Suriname sebagian besar merupakan dasar untuk berkembangnya keinginan untuk kembali ke Indonesia.

Gelombang pertama kuli kontrak dari Jawa untuk perkebunan-perkebunan di Suriname tiba di sana pada tahun 1890. Antara tahun itu dan tahun 1939 jumlah orang Jawa yang mendarat di Suriname seluruhnya sebesar 32.886 orang. Meskipun setelah kontrak berakhir terbuka kemungkinan untuk repatriasi, namun kemungkinan untuk kembali ini dapat diganti dengan bonus sebesar *f.* 100 Suriname. Akan tetapi, hampir semua dari mereka yang karena berbagai hal kandas dalam hutang, terpaksa memilih bonus ini daripada pulang ke Jawa. Dalam jangka waktu tersebut jumlah orang yang kembali hanya 8.130 orang. Yang tidak kembali kebanyakan keluar dari perkebunan dan menjadi petani kecil. Yang lainnya bekerja sebagai buruh pertambangan bouksit atau pegawai

pemerintahan. Secara umum mereka merupakan kelompok yang menduduki posisi terbawah dalam masyarakat Suriname. Menurut sensus tahun 1950 jumlah orang Indonesia di Suriname berjumlah 35.194 orang.

Kurangnya kontak dengan etnis lain serta rendahnya kedudukan ekonomis berkaitan dengan perasaan menjadi korban diskriminasi dari pihak pemerintah menyebabkan orang Jawa merasa sebagai tamu tidak diundang di negara asing. Kenyataan bahwa mereka atau orangtuanya didatangkan dengan janji-janji palsu untuk bekerja di Suriname, memainkan peranan besar dalam dunia pikiran mereka untuk kembali pulang ke Indonesia.

Kesadaran politik sesudah Perang Dunia II turut mendorong orang-orang Jawa di Suriname untuk membentuk partai-partai politik, seperti Pergerakan Bangsa Indonesia Suriname (PBIS) dan Kaum Tani Persatuan Indonesia (KTPI). Kedua partai itu berjuang untuk kembali ke Indonesia dan mencoba untuk memanfaatkan rasa rindu ke tanah air yang ada di kalangan orang Jawa. Wakil-wakil dari kedua partai ini kemudian mengadakan hubungan dengan pemerintah Indonesia yang pada mulanya berusaha mencegah repatriasi tersebut.

Dalam Pemilihan Umum Tahun 1949, KTPI memperoleh dua kursi di parlemen, sedang PBIS tidak memperoleh satu kursi pun. PBIS kemudian lebih menggiatkan usaha kembali ke tanah air. Untuk mengkoordinasi persiapan-persiapan kembali ke tanah air, dibentuklah yayasan tersendiri yang disebut "Yayasan ke Tanah Air" yang berdiri pada tanggal 1 Mei 1951 sebagai cabang organisasi PBIS. Dalam waktu singkat jumlah anggotanya telah mencapai lebih dari 3.000 orang.

Pada bulan September 1953 delegasi yayasan ini mengunjungi Indonesia dengan tujuan untuk memeriksa daerah yang telah dipilih sebagai daerah pemukiman. Kelompok repatrian yang pertama dan satu-satunya sampai saat ini, sejumlah 1.024

orang, tiba pada tanggal 3 Februari 1954 di Padang dan beberapa waktu kemudian terus menuju ke Tongar.

Repatriasi lewat Yayasan ke Tanah Air terjadi atas dasar suka-rela dan keinginan sendiri. Biaya repatriasi pun ditanggung oleh masing-masing anggota. Akan tetapi, yang masuk menjadi anggota diharuskan membeli sejumlah saham Yayasan dengan harga minimal  $f . 100$  Suriname tiap saham. Kebanyakan anggota hanya dapat mengumpulkan jumlah uang tersebut setelah menjual semua harta miliknya yang ada di Suriname. Dengan cara demikian tersisihlah kelompok-kelompok yang termiskin di kalangan penduduk Jawa Suriname yang juga sama-sama berkeinginan untuk kembali ke Indonesia.

## 2.2. Tipe Pemukiman

Tipe pemukiman transmigrasi Tongar merupakan pemukiman yang memperlihatkan ciri-ciri komunal. Sistem yang diterapkan merupakan campuran antara Perseroan Terbatas (PT) dan *kolkhos*. Tujuan akhir yayasan yang mensponsori pembukaan pemukiman ini ialah mencari untung dengan mengusahakan berbagai jenis tanaman perdagangan. Untuk maksud tersebut bidang tanah sengaja dibuat sekecil mungkin di samping 1 Ha tanah pertanian. Setiap keluarga hanya mendapat bidang tanah yang kecil saja di sekitar rumahnya. Untuk tiap keluarga masih dicadangkan lagi sekitar 4 Ha tanah, akan tetapi tanah itu harus diolah bersama, sebaiknya dengan mesin, serta ditanami tanaman yang ditentukan yayasan.

Tanaman yang lebih diutamakan penanamannya ialah coklat, kopi, dan beberapa tanaman tahunan lainnya. Pekerjaan di bidang tanah yang 4 Ha itu diberi upah per jam, meskipun mereka yang menyuruh menggarap tanah mereka mempunyai hak atas pekerjaan tersebut. Hasil panen harus disimpan oleh yayasan dan dijual bersama. Pada setiap akhir tahun, yayasan akan membagi keuntungan berdasarkan saham serta sesuai dengan jumlah jam kerja tiap-

tiap anggota tiap tahun. Keuntungan tidak hanya diperoleh dari penjualan hasil-hasil pertanian, tetapi juga dari hasil pembangan kayu dan industri kecil.

Untuk dapat melaksanakan program ini, telah dibawa serta mesin-mesin dari Suriname atau dibeli di Jakarta. Mesin-mesin itu terdiri dari dua buah traktor, dua buah agregat diesel, sebuah generator listrik, pompa, mesin gergaji yang lengkap, dan empat buah mobil. Hal ini menggambarkan bahwa lokasi ini merupakan salah satu proyek pemukiman yang paling dimekanisasi yang pernah diusahakan di Indonesia. Mesin-mesin ini akan digunakan pula oleh kelompok-kelompok lainnya yang akan datang kemudian dari Suriname. Keadaan ini menerangkan mengapa dalam kelompok pertama itu terdapat teknisi yang besar jumlahnya.

Daerah yang ditetapkan sebagai lokasi transmigrasi ini terdiri dari dataran seluas 5.200 Ha yang sebagian besar tertutup oleh hutan. Terdapat daerah seluas 300 Ha yang ditumbuhi alang-alang, sehingga dapat dengan mudah diolah dengan mesin. Jalur selebar 4 Km di daerah itu membentang sepanjang jalan kelas dua; dari sana traktor-traktor dapat masuk ke daerah tersebut. Kualitas tanah dianggap baik dengan kemungkinan-kemungkinan dibangunnya proyek irigasi. Akan tetapi, karena sebelumnya tidak diadakan penelitian terhadap tanah, kemudian ternyata harapan-harapan ini terlalu optimis. Sebagai akibat lebih lanjut dari faktor-faktor yang tidak diperhitungkan sebelumnya, rencana semula tidak dapat dilaksanakan.

Daerah yang akhirnya ditempati ternyata tidak sesuai dengan yang telah direncanakan semula. Daerah itu tidak terletak terletak di tepi jalan, tetapi agak masuk ke dalam karena tanah yang selebar 400 meter diminta kembali oleh penduduk asli. Akibatnya daerah itu menjadi lebih sulit untuk ditempuh dengan traktor, dan traktor-traktor itu hanya dapat sampai ke sana melalui jalan yang sempit saja. Ternyata pula

daerah itu tidak datar, melainkan dilintasi oleh banyak anak sungai yang kecil. Palung-palung sungai itu dalamnya tiga sampai enam meter dan supaya traktor-traktor dapat lewat harus dibangun jembatan. Hal ini pun cukup menghalangi pembangunan irigasi. Hasil penelitian tanah yang diadakan pada tahun 1955 menunjukkan bahwa tanah itu tidak sedemikian cocok untuk penanaman padi, seperti yang diduga semula.

### **2.3. Kendala-kendala yang Dihadapi Transmigran**

Setelah suatu daerah alang-alang dan hutan rimba seluas 110 Ha dibuka untuk pertama kalinya, maka dimulailah penanaman kacang, ubi kayu, dan kedelai. Akan tetapi, sebagian besar hasil tanaman itu adalah untuk kebutuhan sendiri dan hanya sebagian kecil saja yang dijual. Beberapa orang masih mempunyai sedikit uang simpanan, tetapi kebanyakan di antara mereka telah menggunakan uangnya untuk membeli saham Yayasan. Pihak Yayasan sendiri telah menyetujui untuk membayar upah kerja minimum mula-mula Rp 0,75 per jam atau Rp 6,- per hari. Upah ini kemudian dinaikkan menjadi Rp 9,- per hari dengan jam kerja delapan jam sehari.

Pihak Yayasan setiap bulan harus mengeluarkan banyak uang untuk pembayaran upah dan gaji, sedang pos pemasukan lain praktis tidak ada. Cara kerja demikian menyebabkan pemborosan modal secara besar-besaran. Hal ini tidak dapat dibiarkan berlangsung terus-menerus, apalagi karena sebagian modal Yayasan merupakan pinjaman dari pemerintah. Keadaan semakin diperparah setelah panen padi pertama yang mengecewakan, karena benih yang digunakan rendah mutunya. Dalam waktu yang singkat keadaan keuangan makin memburuk. Upah kerja yang mereka peroleh setiap hari hampir tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok.

Meskipun daerah pemukiman itu bukan tanggungan resmi dari Jawatan Transmigrasi, namun Jawatan Transmigrasi

di Padang dapat menyediakan beras dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, serta kemudian juga uang. Kekurangan uang itu paling mendalam dirasakan oleh teknisi dan tenaga-tenaga administratif yang sudah terbiasa hidup mewah dan mereka tidak dapat memperoleh penghasilan tambahan dari usaha pekarangannya sendiri seperti para petani. Banyak dari mereka terpaksa menjual perhiasan mereka kepada para pedagang keliling Minangkabau.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi transmigran, pada bulan Januari 1955, Pemerintah Pusat lewat Departemen Sosial sekali lagi memberikan pinjaman sebesar Rp 1,5 juta kepada Yayasan. Uang itu terutama direncanakan untuk investasi industri kecil. Dengan cara ini didirikan sebuah pabrik es, penggilingan padi, dan pembangkit tenaga listrik yang semuanya selesai dalam tahun 1955. Selanjutnya pertanian itu diarahkan ke usaha penanaman tanaman tahunan, seperti karet, tebu, kopi, dan rempah-rempah. Sebaliknya usaha penanaman padi kurang mendapat perhatian, tetapi suatu daerah seluas 25 ha ditanami ubi kayu. Oleh karena kebanyakan dari tanaman itu baru mulai memberikan hasilnya sesudah tujuh sampai sepuluh tahun, sekali lagi daerah pemukiman itu menghadapi masalah bagaimana cara menjembatani periode peralihan. Untuk tujuan ini Yayasan mengharapkan pinjaman baru lagi, dengan menyusun rencana lima tahun yang bertujuan untuk mencapai taraf swasembada pada tahun 1959. Akan tetapi, pemerintah tidak bersedia membiayai rencana jangka panjang tersebut, meskipun pemerintah sadar bahwa gagalnya pemukiman ini akan memberi kesan yang tidak baik di Suriname.

### **3. HUBUNGAN DENGAN PENDUDUK ASLI**

#### **3.1. Perbedaan-perbedaan Kultural**

Hubungan antara imigran dan penduduk asli dalam banyak hal dapat bersifat menentukan untuk berhasil tidaknya suatu

daerah pemukiman. Untuk mengerti sikap penduduk asli di Minangkabau, masalah hak atas tanah merupakan hal yang pokok. Di Minangkabau, penduduk suatu *nagari* boleh memakai sebidang tanah kosong mana pun dalam nagari tersebut, sedangkan pendatang terbatas hanya pada daerah yang telah diperuntukkan baginya.

Nagari sebagai satuan teritorial di Minangkabau dibagi dalam berbagai *kampung* (kampung) yang dikepalai oleh seorang penghulu. Hak untuk menetap di suatu kampung tertentu, hanya dapat diberikan oleh "Kerapatan Nagari". Orang luar yang mendapat hak mengolah tanah harus membayar sejumlah retribusi. Ketentuan ini tidak berlaku apabila orang luar itu diangkat sebagai "kemenakan" oleh penghulu. Dengan demikian penghulu bertindak sebagai *mamak* (saudara laki-laki ibu) untuk pendatang baru tadi yang kemudian memperoleh hak dan kewajiban yang sama seperti kemenakan lainnya dengan syarat, kemenakan angkat atau pendatang baru tersebut harus bertingkah laku yang sesuai dengan adat Minangkabau.

Sistem ini ternyata dapat memberi pemecahan untuk menampung kelompok repatrian Suriname ini. Dengan cara ini mereka semua, sebagai keluarga, diterima oleh penghulu daerah bersangkutan dalam suatu upacara resmi yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintah dalam bulan Mei 1954. Menurut hukum adat dengan demikian mereka dan keturunannya memperoleh hak pakai atas tanah, tetapi mereka tidak mempunyai hak untuk menjual tanah itu atau mewariskan hak pakainya kepada yang belum diangkat sebagai "kemenakan". Apabila tanah itu tidak digarap atau bila tidak ada keturunan laki-laki, maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada "nagari". Semua kegiatan yang akan dilakukan pendatang, seperti pernikahan, upacara kematian, selamatan, dan kegiatan lainnya harus seizin penghulu. Mereka secara mutlak harus tunduk kepada keputusan-keputusan kepala adat, sekalipun keputusan itu mencakup

pencabutan atas hak-hak yang telah diberikan akibat pelanggaran-pelanggaran adat yang mereka lakukan.

Di atas kertas, persetujuan ini memberi pemecahan yang dapat diterima kedua pihak untuk persoalan mengenai hak atas tanah. Tekanan dari pihak pemerintah telah menyebabkan para pendatang menyetujuinya. Jalan pikirannya ialah menerima pendatang-pendatang baru secara legal dalam masyarakat Minangkabau dengan memberikan mereka status yang sama seperti orang Minangkabau yang mendirikan pemukiman baru. Perbedaannya terletak dalam hal bahwa pendatang-pendatang baru tersebut tidak diminta uang retribusi yang diwajibkan adat, dan ini merupakan suatu pendekatan dari pihak Minangkabau. Di lain pihak daerah pemukiman yang baru ini tidak mendapat status *kampung*, dan pemimpin mereka yang dari Suriname pun tidak diberi kedudukan sebagai penghulu.

Tuntutan yang diajukan ini, baik untuk pemerintah setempat maupun Jawatan Transmigrasi, merupakan hal yang sangat mengejutkan, karena Jawatan Transmigrasi sudah mulai membangun beberapa barak penampungan di atas tanah yang dituntut kembali itu. Akibatnya suasana menjadi tegang, yang kemudian ditambah lagi dengan kenyataan bahwa perbedaan-perbedaan kultural antara orang Jawa Suriname dan Minangkabau lebih besar daripada yang diduga semula.

Perbedaan yang paling tajam dirasakan adalah perbedaan agama. Sebanyak 129 orang atau 12,5 % dari repatriation adalah beragama Kristen, sisanya sebanyak 87,5 % beragama Islam. Meskipun mayoritas Muslim, tetapi mereka adalah Islam *abangan* yang sangat bertentangan dengan pemahaman ajaran Islam orang Minangkabau. Orang Jawa sendiri menganggap perbedaan agama bukan sebagai sesuatu yang penting. Mereka selalu sangat heran bila orang Minangkabau mengajukan pertanyaan kepada mereka: "Adakah dua

partai di dalam kampung kalian?". Solidaritas di antara mereka tidak terganggu karena adanya perbedaan agama.

Perbedaan kultural lainnya adalah dalam bidang bahasa. Orang Jawa Suriname menggunakan bahasa Jawa dalam pergaulan di antara mereka sendiri. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang tidak cukup mereka kuasai, karena sebelumnya mereka memang tidak memerlukannya. Mereka baru belajar menggunakan bahasa Indonesia setelah berada di Tongar. Penduduk asli sebaliknya menggunakan bahasa Indonesia untuk pergaulan umum dan bahasa Minangkabau di antara mereka sendiri. Perbedaan bahasa merupakan salah satu faktor penghalang komunikasi antara dua kelompok masyarakat ini.

Perbedaan kebudayaan yang dirasakan sebagai hal yang sangat bertentangan dengan pola norma di Minangkabau adalah kebiasaan pendatang melakukan dansa atau tari-tarian modern dari Amerika Latin seperti Rumba, Tango, dan sebagainya. Bagi orang Minangkabau tarian demikian sangatlah terkutuk sehingga pada berbagai kesempatan telah mengakibatkan terjadinya insiden karena pemuda-pemuda yang fanatik mengganggu acara-acara dansa, bahkan di dalam rumah-rumah kediaman pribadi sekalipun. Hal yang sama pula berlaku untuk norma-norma pergaulan antarjenis kelamin, seperti berjalan bergandengan tangan, ko-edukasi dalam olahraga, dan sebagainya.

### 3.2. Tanggapan Penduduk Asli

Semua corak dalam pola kebudayaan Suriname yang diadopsi oleh orang Jawa yang pernah bermukim di sana, sama sekali tidak dapat diterima oleh penduduk asli. Pola tingkah laku para pendatang telah menimbulkan keluhan-keluhan di kalangan penduduk asli yang mengatakan bahwa orang Jawa Suriname tidak bertindak sebagai kemenakan yang baik, sehingga karena itu penghulu menjadi malu.

Suatu peristiwa tak terduga yang terjadi ialah ketika masyarakat Minangkabau meminta kembali tanah seluas 400 meter sepanjang tepi jalan. Masyarakat Minangkabau rupanya sudah menyesal dan tiba-tiba para kepala adat menuntut kembali sebidang tanah yang termasuk dalam penyerahan semula. Argumen yang dikemukakan ialah bahwa akta penyerahan tidak sah, karena penghulu sebenarnya tidak berhak menyerahkan tanah kepada pihak ketiga, bahkan kepada pemerintah pun tidak.

Alasan sebenarnya dari langkah yang tidak terduga sebelumnya ini menjadi tidak jelas. Dalam masalah ini berkemungkinan terdapat suatu pertikaian antara penghulu dan warga desa biasa. Motif-motif ekonomilah yang diperdebatkan, misalnya karena dihapusnya retribusi yang seharusnya masuk ke kas nagari. Kemungkinan lainnya ialah bahwa adanya perasaan cemas di kalangan penghuni desa kalau-kalau di kemudian hari akan timbul kekurangan tanah, karena akan datang waktunya sengketa tanah antara imigran dengan penduduk asli.

Mengenai persoalan perbedaan sistem religi antara pendatang dengan penduduk asli, Buya Hamka, seorang penulis dan ulama terkenal dari Minangkabau menulis sebuah artikel dalam harian *Haluan* yang terbit di Padang tanggal 11 November 1954. Setelah repatriation-repatriation tersebut berjanji akan mematuhi adat Minangkabau sebagai syarat utama penyerahan tanah, menurut Hamka semua itu telah direncanakan sebelumnya. Bagaimana mungkin pemimpin kelompok transmigran tidak mengetahui agama yang dianut oleh orang-orang dalam kelompoknya? Direktur Jawatan Transmigrasi di Ibukota pun seharusnya mengetahui bahwa ia tidak mengatakan hal yang sebenarnya ketika mengadakan perjanjian di hadapan gubernur dan bupati.

Tanggapan lainnya dikemukakan oleh Haji Ali Akbar, anggota parlemen dari Masyumi yang berasal dari Minangkabau pada bulan April 1956. Ali Akbar memberikan keterangannya dalam

propaganda umum tentang program kabinet Ali Sastroamidjojo II mengenai transmigrasi. Penjelasan itu mencerminkan pendirian sebagian orang Minangkabau mengenai persoalan tersebut, yaitu:

1. Semua transmigran harus masuk meresap ke dalam cara hidup masyarakat penerima transmigran, agar para migran itu tidak merupakan koloni tersendiri seperti yang pernah terjadi pada zaman Belanda sesuai dengan politik memecah belah di kalangan bangsa Indonesia. Yang diharapkan adalah justru agar mereka memperkuat etnis yang menerima mereka itu. Ali Akbar menyatakan bahwa kaaqmi orng Minangkabau tidak berkeberatan menampung lain-lain suku di daerah Minangkabau asalkan pendatang-pendatang baru itu mau menjadi kemenakan kami. Yang terlihat sekarang adalah bahwa orang-orang Jawa yang datang ke Minangkabau tetap mempertahankan kejawaannya sehingga mereka bagaikan duri dalam daging di Minangkabau.
2. Semua transmigran haruslah menganut adat dan agama masyarakat penampung, dan pemerintah pun harus menyeleksi migran sesuai dengan adat dan agama dari kelompok di mana mereka akan ditempatkan.
3. Dalam memberi bantuan kepada migran, baik yang berupa bantuan keuangan maupun alat-alat pertanian seperti traktor, pemerintah seharusnya jangan lupa membantu penduduk asli di daerah-daerah transmigrasi. Kebun-kebun dan perumahan para transmigran di Pasaman jauh lebih baik daripada yang dimiliki penduduk asli. Perbedaan ini tentu tidak membantu memperbaiki hubungan antara transmigran dan penduduk asli.

### **3.3. Dampak yang Timbul Akibat Terjadinya Konflik**

Konflik-konflik yang timbul akibat agresi yang dilakukan oleh penduduk asli tidak lepas dari pertentangan. Orang tidak

lepas dari kesan bahwa ada semacam keengganan untuk menerima gagasan transmigrasi itu sendiri. Kesulitan-kesulitan dan masalah hampir selalu dilontarkan oleh orang-orang Minangkabau dan bukannya oleh transmigran. Tuntutan dikembalikannya tanah kepada mereka merupakan contoh yang jelas. Kecemasan bahwa nanti transmigran dalam ekonomi akan melebihi penduduk asli atau akan terjadi kekurangan tanah, telah menyebabkan orang Minangkabau bersikap demikian.

Alasan lainnya ialah bahwa di Minangkabau orang kurang mempunyai pengalaman mengenai transmigrasi dari Jawa, berbeda dengan daerah lain seperti Lampung misalnya, orang sudah terbiasa dengan transmigrasi sejak sebelum perang. Memang di waktu lampau pernah pula imigran-imigran dari luar ditampung dalam masyarakat Minangkabau, tetapi mereka itu kebanyakan orang perorangan atau kelompok kecil yang kehidupan ekonominya lemah. Migran-migran seperti ini tidak dianggap berbahaya bagi masyarakat Minangkabau, sebaliknya mereka bahkan berguna sebagai buruh dalam perkebunan-perkebunan kopi atau karet, menjual hasil usahanya kepada pedagang-pedagang Minangkabau, dan lama kelamaan bahkan menghasilkan menantu-menantu laki-laki yang berkenan kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keberatan-keberatan terhadap transmigran ini tidak ditujukan kepada etnis Jawa secara keseluruhan, tetapi kepada bahaya *enclave* homogen serta terorganisasi baik dalam masyarakat Minangkabau.

Sementara itu, kelompok dari Suriname selalu memandang dirinya sebagai perintis dari 2.000 lebih anggota yayasan yang masih menantikan repatriasi di Suriname. Berulang kali mereka mendesak agar mereka yang masih di sana didatangkan dan diadakan pinjaman-pinjaman baru lagi. Akan tetapi, pemerintah Indonesia berdasarkan pengalaman di Minangkabau, berpendapat tidak harus menggiatkan pemulangan orang-orang Indonesia yang lain

dari Suriname. Keputusan ini akhirnya dianggap tidak menguntungkan dari para repatrian.

Nasib selanjutnya dari pemukiman ini lebih menyedihkan lagi ketika meletusnya peristiwa pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) melawan Pemerintah Pusat pada bulan Februari 1958. Angkatan bersenjata pemberontak menganggap transmigran-transmigran Jawa sebagai angkatan ke-5 dan untuk mengekangnya mereka mengadakan teror.

Harian Jakarta Sin Po akhir Juli 1958, memberitakan bahwa seluruh daerah pemukiman Tongar dikepung dan hanya diberi waktu dua jam sebagai persiapan mengungsi; setelah itu bangunan-bangunan di sana dibumihanguskan. Sesudah menempuh suatu perjalanan yang berat yang menyebabkan 14 orang meninggal dunia, sisa kelompok itu tiba di Bukittinggi. Sebagian di antara mereka kemudian kembali ke Tongar dan membangun rumah mereka serta menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Sebalian lagi tetap tinggal di Bukittinggi dan sisanya kemudian menyebar ke berbagai kota yang ada di Sumatera Barat

## Penutup

Serangan yang dilakukan oleh penduduk asli, dalam hal ini orang Minangkabau, terhadap pendatang, dalam hal ini orang Jawa Suriname dapat digolongkan sebagai bentuk agresi naluri yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Agresi yang dilakukan oleh penduduk asli dilandasai oleh tujuan untuk mempertahankan keberadaan diri atau kelompok mereka. Agresi ini juga dipicu oleh kecemasan sebagian penduduk asli bahwa penduduk pendatang yang dibantu secara finansial oleh pemerintah akan mendominasi perekonomian dan penduduk asli beberapa generasi berikutnya akan kekurangan tanah.

Kebiasaan warga transmigran yang mengadopsi budaya Amerika Latin, seperti melakukan dansa atau tari-tarian modern seperti rumba dan tango, turut memicu terjadinya agresi yang dilakukan oleh penduduk asli. Kebiasaan yang lain seperti berpegangan tangan ketika berjalan, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dalam olahraga, dan cara berpakaian perempuan mereka yang meniru cara berpakaian orang Amerika Latin, sangat tidak disukai oleh penduduk asli karena dianggap bertentangan norma-norma setempat. Pola tingkah laku para pendatang ini menimbulkan keluhan-keluhan penduduk asli yang mengatakan bahwa mereka tidak bertindak sebagai keminoran yang baik, sehingga karena itu penghulu menjadi malu.

Puncak dari agresi yang dilakukan oleh penduduk asli terhadap pendatang ini adalah ketika terjadi peristiwa pemberontakan PRRI melawan Pemerintah Pusat yang notabene oleh penduduk asli dianggap sebagai orang Jawa. Tindakan-tindakan kejam yang dilakukan oleh Tentara Pusat sewaktu membasmi pemberontakan PRRI, seperti memperkosa telah menimbulkan kemarahan dikalangan penduduk asli. Warga transmigran yang tidak bersalah apa-apa, hanya karena kebetulan juga berasal dari etnis Jawa, menjadi sasaran kemarahan penduduk asli. Mereka dituduh sebagai angkatan ke-5 dan untuk mengekangnya penduduk asli mengadakan teror dan membumihanguskan pemukiman warga transmigran.

#### DAFTAR PERPUSTAKAAN

- Achmad, Sulistinah I., 1995, "Pelaksanaan Program Transmigrasi dan Permasalahannya", dalam *Warta Demografi*, No. 2, Th. 25.
- Heeren, H.J., 1979, *Transmigrasi di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.
- Sahur, Ahmad, et al., 1988, *Migrasi, Kolonisasi, Perubahan Sosial*, PT Pustaka Grafika Kita, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2002, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, Balai Pustaka, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Teori-teori Psikologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Swasono, Sri-Edi & Masri Singarimbun (eds.), 1985, *Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Wiyono, Nur Hadi, 1995, "Pasang Surut Perjalanan Transmigrasi di Indonesia", dalam *Warta Demografi*, No. 2, Th. 25.
- Wiggins, J., Wiggins, B. and Zanden, J., 1994, *Social Psychology*, McGraw-Hill, Inc (5<sup>th</sup> ed).
- Yudohusodo, Siswono, 1998, *Transmigrasi Kebutuhan Negra Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang*, PT Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta.